

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal/penelitian.

- Abberly, P. (1987). The Concept of Oppression and The Development of A Social Theory of Disability. *Journal Disability, Handicap and Society*, 2(1), 5-20.
- Agoes,S dan I Cenik Ardana. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bibler, S. Dkk. (2014). *Kesetaraan Gender dan Penyelenggaraan Pemilu*. International Foundation For electoral Systems .
- Birch, S. (2009). Full Participation A comparative Study of Compulsory Voting,United Nation University Press, Tokyo, New York, Paris.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan, Publik dan Ilmu Sosial* . Jakarta: Kencana Prenama Media Grup.
- Effendi, C. (2006), *Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*,makalah Seminar Nasional “Mencari Format Baru Pemilu dalam Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Bidang Politik”, Jakarta, 10 Mei, diselenggarakan Departemen Dalam Negeri dan LIPI.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryani, A dan Enung Huripah. (2014). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Netra dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Panti Sosial Bina Netra "WYATA GUNA" Bandung. *Jurna Agregasi*, 2(1), 89-104.
- Haywood, A. (2002). *Politics*, 2nd Edition, Palgrave, New York, hal.230-231; Rod Hague, Martin Harrop dan Shaun Breslin, 1992, hal. 182-184.
- Hendrik, D. (2010). Variabel-variabel yang mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. *Jurnal Demokrasi*, 9(2), 137-147.
- Huntington, S.P dan Jon M Nelson. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- James, Toby S. *et al.* (2019). “Electoral management and theorganisational determinants of electoral integrity: Introduction”.*International Political Science Review*. Vol. 40(3). hal.295-312.

- Junaidi, V. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewarganegaraan . *Jurnal Demokrasi*.
- Kana, N.C dan Pradjarta DS. (2006). *Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004*. Salatiga: Pustaka Percik.
- Kansil, C. (1998). *Memilih dan Dipilih*. Jakarta: PT. Pradiya Paramita.
- Lasida, I. G. (2017, September). Membangun Pemilu Inklusif Untuk Difabel. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 57-65.
- Maftuhin, A. (2017, Mei). Mendefinisikan Kota Inklusif : Asal-Usul, Teori dan Indikator. *Jurnal Tata Loka*, 19(2), 93-103.
- Merly, M. (2015, Agustus). Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(2), 61-77.
- Milles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nam, C. (2015). *Why? Edu Comic Book Science - Disability & Science*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nursyamsi, F. Dkk. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Jakarta: PSH.
- Pahlevi, I. (20199, Juni 1). Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya. *Jurnal Politika*, 2(1), 45-72.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
- Parsons, Wayne (2005). *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Tri Wibowo Budi (Alih bahasa). Jakarta : Kencana Prenada Media
- Prasetyoningsih. (2014, Desember). Dampak Pemilihan Umum Serentak bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 241-263.
- Prihatmoko. (2004). *Pemilu dan Konsolidasi*. Semarang: LP21

- Riwanto, A. Dkk. (2018). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal. *Seminar Nasional Hukum*, 4(3), 697-718.
- Rush, M dan Philliph Althoff. (2000). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Salim, I. Dkk. (2014). *Memahamai Pemilhan Umum dan Gerakan Politik Kaum Difabel*. Yogyakarta: SIGAB.
- Salim, I dan M Syafi'ie (2015). *Hidup dalam Kerentanan Narasi Kecil Keluarga Difabel*. Yogyakarta: SIGAB.
- Salim, I. (2015). *Difabel Merebut Bilik Suara*. Yogyakarta: SIGAB.
- Salim, I. (2015, Juli). Perspektif Difabilitas dan Kontribusi Gerakan Difabilitas bagi Terbangunnya Pemilu Inklusi di Indoeisa. *The Politic*, 1(2), 127-155.
- Sari, A. J dan I Made Suwanda . (2014). Implementasi Pendidikan Demokrasi pada Anak Berkebutuhan Khusus Tunarungu di Smalb-B Pgrri Dlanggu. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 2(3), 1046-1060.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyanto, D. (2007). *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Sutopo. (2012). *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.
- Syafi'ie, M. (2014, Desember). Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Inklusi*, 1(2), 269-307.
- Wahyuni, S. (2018). *Membangun Pemilu Inklusif*. Purbalingga: SatelitPost.
- Zainal, M.A. Dkk (2018). Partisipasi dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Yayasan Yukartuni Makassar pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Politik Profetik*, 6(1), 106-116.
- Skripsi dan Thesis :**
- Ade, Rio Saputra. (2018). *Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas (Kasus Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di Kabupaten Padang Pariaman)*. Masters thesis, Universitas Andalas.

Octaviani, Wiwin.(2015). *Studi tentang Upaya Sosialisasi Pemilu oleh Relawan Demokrasi pada Penyandang Tuna Grahita dalam Pemilu Legislatif 2014 di Kota Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Gadjah Mada.

Yanangsih, khoiri. (2014). *Aksesibilitas Pemilihan Umum Legislatif 2014 bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Yuhanda, Ferry. (2016). *Pemenuhan Aksesibilitas Hak Politik bagi Difabel dalam Pemilukada 2015 (studi tentang aksesibilitas difabel dalam pelaksanaan pemilukada di kabupaten sragen)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

SK KPU RI Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/Kpu/XII/2018.

SK KPU RI Nomor 2054/PP.01-Kpt/01/Kpu/XII/2018.

Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CPRD).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018

Modul dan Risalah Rapat/ Laporan Kegiatan

Agenda Kegiatan Partisipasi Masyarakat KPU Sumatera Barat Kode Program 3364.003 (Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, Ormas, LSM, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat).

International IDEA, Demokrasi dan Konflik yang mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator, Seri Buku Pegangan International IDEA, Jakarta, 2000, hal.

Laporan Pemantauan Pemilu Akses Jakarta 2017.

Laporang Kegiatan Partisipasi Perempuan, Disabilitas dan Kelompok Marginal dalam Pemilu 2019 pada tanggal 20 Desember 2018.

Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Dukungan LSM, Ormas dan OKP untuk Mensukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 25 Januari 2019.

Laporan Kegiatan Sosialisasi dengan PERTUNI dan Difabel Netra pada tanggal 9 April 2019.

Laporan tentang KPU Goes to Campus/School/Community (Pemilih Disabilitas Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat tanggal 13 Maret 2019.

Modul Ringkas Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas.

Modul Assesmen Kualitas Pemilu.

Risalah Rapat divisi Teknis dan Hupmas bersama komisioner mengenai Partisipasi dan Pendidikan Pemilih pada tanggal 11 Januari 2019.

Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) 2, dan 3 Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh KPU Sumatera Barat.

Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2018 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019: Perihal Para Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu RI

Internet :

Admin. (2019). *Jumlah Pemilih Disabilitas Sumbar Capai 9.172 Orang*. Padang: SumbarFokus.com. Retrieved Oktober 8, 2018, from <https://www.sumbarfokus.com/berita-jumlah-pemilih-disabilitas-sumbar-capai-9172-orang.html>

(Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, n.d.), dilansir dari laman [809/target-partisipasi-775-kemendagri-gencarkan-sosialisasi-untuk-pemilih-pemula-dan-milenial/0/berita](https://www.kemkominfo.go.id/berita/809/target-partisipasi-775-kemendagri-gencarkan-sosialisasi-untuk-pemilih-pemula-dan-milenial/0/berita)

Prasetyo, E. (2017). *KPU : Inovasi Diperlukan dalam Pilkada dan Pemilu*. Dilansir dari laman <https://news.okezone.com/read/2017/12/01/340/1823514/kpu-inovasi-diperlukan-dalam-pilkada-dan-pemilu> pada tanggal 18 Desember 2019.

Prasetyo Muharam. D. (2014). *Difabel atau Disabilitas*. Dilansir dari laman <https://www.kartunet.com/difabel-atau-disabilitas-8063/> pada tanggal 29 November 2018.

Profil KPU Sumatera Barat, https://sumbar.kpu.go.id/index.php/profil/visi_misi_tujuan dilihat pada 24 April 2019.

Putra, P. (2019). *Pemilih Disabilitas di Sumatera Barat Diberi Kemudahan*. Padang: Kompas.com. Retrieved Oktober 8, 2019, from <https://regional.kompas.com/read/2019/04/04/16240241/pemilih-disabilitas-di-sumatera-barat-diberi-kemudahan>

Rekapitulasi Data Statistik Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sumatera Barat) diakses melalui <http://sumbar.kpu.go.id/filemanager/8ac83675f3af47feef56a5741624142b.pdf>

Rekapitulasi Hasil Pilkada Sumatera Barat diakses dari <https://pilkada2015.kpu.go.id/sumbarprov>

SumbarFokus.(2019). *Sepuluh Ribu Lebih Penyandang Disabilitas Sudah Terdaftar sebagai Pemilih di Sumbar*; diakses dari <https://www.sumbarfokus.com/berita-sepuluh-ribu-lebih-penyandang-disabilitas-sudah-terdaftar-sebagai-pemilih-di-sumbar.html> pada 8 Juli 2019.

Visi Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) dilansir pada laman <https://pertuni.or.id/tentang-pertuni/visi-dan-misi-pertuni/> pada tanggal 19 September 2019.

Yusfita, R. D. (2019). *Ada 10.319 Pemilih Difabel di Sumbar, Begini Desain TPS yang Mesti Didirikan Sesuai Aturan KPU*. Padang: TribunPadang.com. Retrieved Oktober 8, 2019, from <https://padang.tribunnews.com/2019/04/04/ada-10319-pemilih-difabel-di-sumbar-begini-desain-tps-yang-mesti-didirikan-sesuai-aturan-kpu>